

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Latar belakang kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan sendiri muncul akibat ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar dari standar hidup tertentu. Sedangkan Menurut Suparlan (1984) kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional yang memiliki arti kemiskinan dapat mencakup berbagai aspek dan dimensi (Dharmmayukti dkk., 2021).

Menurut (Dewi & Andrianus, 2021) kemiskinan adalah kondisi individu yang tidak mampu secara ekonomi dalam pemenuhan standar minimal kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum kemiskinan terbagi atas dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok paling minimal, yaitu sandang, pangan, perumahan dan lainnya. Kemiskinan relatif merupakan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan relatif akan selalu terjadi karena merupakan perbandingan antara tingkat kemiskinan individu dengan individu lainnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan (Papilaya, 2020).

(Kwalomine, 2021) berpendapat bahwa walaupun berbagai program intervensi pengentasan kemiskinan dari tingkat nasional dan lokal telah digulirkan, tetapi fakta masih menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih belum terselesaikan. Minimal angka kemiskinan tersebut secara kuantitatif tidak mengalami penurunan yang signifikan. Tentu, kondisi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya banyak dimensi yang dapat menjelaskannya. Penyebab kemiskinan terjadi antara lain karena tekanan struktur, relasi sosial, ketidak-berdayaan dan lemahnya akses ekonomi, daya dukung infrastruktur serta lingkungan sosial budaya yang tertanam (*embeddedness*) dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial dan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Sangadah dkk., 2020) .

Bantuan sosial ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar. Masalah dalam pemberian dana bantuan adalah adanya keterbatasan dana yang akan disalurkan sementara itu terjadi kemiripan data keadaan ekonomi penerima dana bantuan sehingga perlu mengklasifikasikan data penerima bantuan. Dengan status/tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak begitu jelas, membuat bantuan dana pemerintah yang ada cenderung tidak tepat sasaran. Keadaan ini menyebabkan masyarakat yang lebih pantas menerima dana bantuan tidak mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada penyaluran dana bantuan ini yaitu belum adanya system yang mendukung, sehingga proses pemilihan hanya menggunakan pikiran saja dan belum adanya perhitungan yang tepat pada saat pemilihannya. Sebagai contoh pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pendataan masyarakat masih manual, begitu juga dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga terkadang masyarakat melakukan protes karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan dana tersebut, begitupun sebaliknya. Untuk itu dibutuhkan sebuah system yang dapat menunjang keputusan.

Menurut (Septilia & Styawati, 2020) Sistem Pendukung Keputusan adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semiterstruktur. SPK dimaksud untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka.

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan (Sholinka & Aji, 2020).

Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi. Sistem Pendukung Keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah. Sistem Pendukung Keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi (Lestari dkk., 2021).

Logika fuzzy adalah salah satu komponen komputasi lunak. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori set fuzzy. Dalam teori himpunan fuzzy, peran derajat asosiasi sebagai elemen penting dalam himpunan tertentu. Nilai pendapat atau tingkat partisipasi adalah karakteristik utama penalaran dengan logika fuzzy. Dalam logika klasik, diskusi beberapa elemen dalam himpunan disajikan dengan 0 jika bukan anggota dan 1 jika itu adalah anggota. Jadi set adalah  $\{0,1\}$ . Sedangkan logika fuzzy memiliki banyak nilai. Tidak seperti elemen yang dikategorikan 100% benar atau salah, fuzzy dibagi menjadi beberapa tingkatan dan pada interval  $[0,1]$  yang merupakan sesuatu yang dapat menjadi bagian dan bagian pada saat yang bersamaan (Anistyasari & Noer, 2020).

Basis data fuzzy model Tahani masih menggunakan relasi standar, namun model tersebut menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi query. Tahani menjelaskan metode pemrosesan query fuzzy berdasarkan operasi bahasa yang disebut Structured Query Language (SQL). Oleh karena itu, model fuzzy Tahani sangat cocok untuk proses pencarian data yang akurat dan akurat. Menurut (Sianturi dkk, 2020) basis data fuzzy model Tahani masih tetap menggunakan relasi standar, hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Sebagian besar basis data standar diklarifikasikan berdasarkan bagaimana data tersebut dipandang oleh pengguna.

Dengan adanya system pendukung keputusan (SPK) menggunakan logika fuzzy bertujuan untuk melakukan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya kemampuan system dalam pengambilan keputusan sesuai dengan metode yang dirancang maka diharapkan proses penyeleksian menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan perancangan system penunjang keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat membantu dalam memutuskan calon penerima bantuan dana pemerintah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berkeinginan merancang sistem informasi penunjang keputusan dengan menuangkannya dalam sebuah tugas akhir dengan judul : **“PENERAPAN LOGIKA FUZZY UNTUK MENGLASIFIKASIKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI ACUAN PENERIMAAN BANTUAN DANA PEMERINTAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dapat mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penerimaan bantuan dana pemerintah pada Dinas Sosial Mentawai Berbasis Web?
2. Bagaimana sistem informasi yang dirancang dapat memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan penerima bantuan dana pemerintah pada Dinas Sosial Mentawai ?

## **1.3 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik dugaan sementara (*hipotesis*) sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya sistem yang menggunakan Metode Fuzzy Tahani yang akan mengeluarkan output berupa ketentuan yang menyatakan golongan tingkat kesejahteraan keluarga ini, diharapkan dapat membantu Dinas Sosial Mentawai dalam pengambilan keputusan khususnya pegawai yang berada di bidang penyaluran bantuan dana pemerintah dapat dengan mudah menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak sesuai dengan klasifikasi yang telah di tentukan.
2. Pemakaian bahasa pemograman PHP dan database MySQL pada sistem pengambilan keputusan diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan perhitungan klasifikasi data calon penerima bantuan pada Dinas Sosial Mentawai.

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam perancangan sistem pengambilan keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penerimaan bantuan dana pemerintah.
2. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan Metode Fuzzy Tahani dengan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari perancangan sistem penunjang keputusan ini adalah :

1. Merancang sistem pendukung keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penerimaan bantuan dana pemerintah pada Dinas Sosial Mentawai Berbasis Web.
2. Menguji dan menerapkan sistem informasi untuk memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan penerima bantuan dana pemerintah pada Dinas Sosial Mentawai .

### 1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bagi penulis

- a. Mengetahui penerapan metode Fuzzy untuk sistem pengambilan keputusan
- b. Dapat memperdalam mempelajari ilmu tentang implementasi sistem pendukung keputusan dikarenakan pengangkatan judul penelitian dengan tema sistem pendukung keputusan ini.
- c. Menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ,serta menjadi pedoman dalam audit sistem informasi lainnya.

#### 2. Bagi instansi

Adapun manfaat bagi Dinas Sosial dari sistem pengambilan keputusan ini adalah ini adalah:

- a. Bermanfaat untuk membantu masyarakat, khususnya pegawai dalam menentukan penerimaan bantuan dana pemerintah
- b. Bermanfaat dalam meningkatkan akurasi penentuan penerimaan bantuan dana pemerintah yang lebih tepat sasaran terhadap masyarakat yang layak.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Penelitian ini berfokus pada observasi dan wawancara dengan tujuan mengungkap data, fakta, fenomena, elemen dan kondisi yang terjadi saat penelitian dilakukan. Menurut (Patawala & Manuputty, 2021). Penelitian terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

### **1. Studi Literatur**

Tahap ini fokus pada proses analisis teori pada penelitian terdahulu yang relevan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

### **2. Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah metode pengumpulan, pengategorian serta proses analisis data yang tersedia, pengumpulan data melalui proses observasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui proses wawancara dengan bagian pengelolaan dan pengoperasian.

### **3. Analisis Data**

Tahapan ini fokus pada proses analisis data identitas penduduk menggunakan sistem pengambilan keputusan dengan metode fuzzy logic model tahani.

### **4. Hasil dan Kesimpulan**

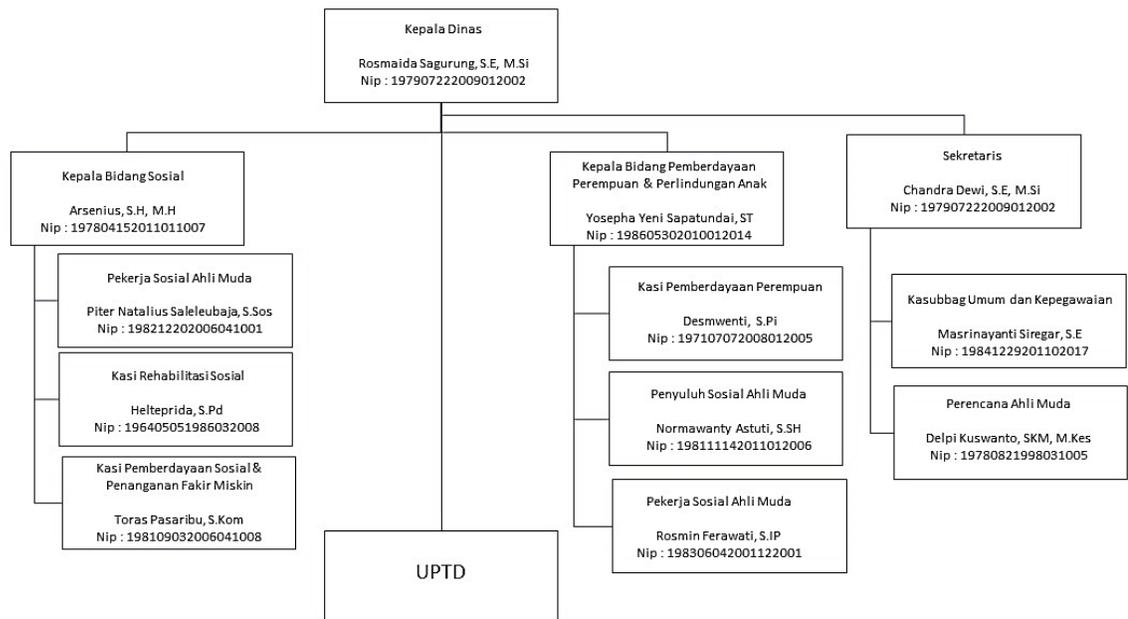
Pada tahap ini peneliti akan menulis kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis data.

## 1.7 Tinjauan Umum Instansi

### 1.7.1 Sejarah Dinas Sosial Mentawai

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi di Jl. Raya Tuapejat KM. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Mentawai juga digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial Mentawai memberikan layanan konsultasi, informasi dan pendataan sosial bagi masyarakat Mentawai.

### 1.7.2 Struktur Dinas Sosial & P3A Mentawai



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial & P3A Mentawai (2022)**